

Politisi Muhammadiyah Diminta Tetap Menjalin Koordinasi

Hal. 21

■ Heri Purwata

YOGYAKARTA — Warga Muhammadiyah perlu diberi kebebasan dan dukungan untuk berkiprah di ranah politik praktis. Hal ini penting untuk menjalin ikatan antara kader Muhammadiyah yang aktif di eksekutif, legislatif, yudikatif, dengan kader Muhammadiyah yang bergerak di organisasi.

“Kader Muhammadiyah yang berkiprah di mana pun termasuk di partai politik, tetap pada akhirnya harus kembali ke Muhammadiyah,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Negeri Malang, Muhadjir Effendy, dalam seminar “Muhammadiyah, Civil Society, dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua” di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), akhir pekan lalu.

Muhadjir mengatakan, kader Muhammadiyah harus berkontribusi bagi perjuangan persyarikatan. Mereka juga harus membawa nilai-nilai yang diperjuangkan persyarikatan di mana pun berada. Sebab, menurut Muhadjir, kader Muhammadiyah yang bergerak di politik praktis (*hard politics*) harus bekerja sama dengan kader yang bergerak di bidang politik nonpraktis (*soft politics*).

“Atmosfer demikian, perlu dikondisikan dan direalisasikan dalam setiap kepemimpinan

an Muhammadiyah,” ujarnya.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar harus menjadi momen untuk mengkaji pemikiran dan gerakan keorganisasian. Menurut Muhadjir, Muhammadiyah harus melakukan redefinisi, reorientasi, dan sekaligus reaktualisasi peran sebagai organisasi gerakan dakwah yang bernapaskan *tajdid* agar selalu selaras dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Apalagi, usia Muhammadiyah sudah memasuki abad kedua.

Muhadjir mengatakan, Muhammadiyah sebagai organisasi harus mampu memobilisasi sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dia meminta pimpinan Muhammadiyah, khususnya Majelis Pendidikan Tinggi, dapat mengarahkan peran perguruan tinggi Muhammadiyah agar bisa berkontribusi bagi perjuangan persyarikatan.

Bagi Majelis Hikmah dan Majelis Kader perlu memberikan rambu-rambu dan tidak kenal menyerah mengingatkan kader Muhammadiyah yang terlibat dalam kegiatan politik praktis agar tetap berada dalam pusaran misi Muhammadiyah ke depan.

Kemampuan Muhammadiyah dalam mengoptimalkan, mengkoordinasikan, dan menyinergikan semua potensi merupakan modal dasar bagi suksesnya perjuangan Muhammadiyah untuk ikut memba-

ngun peradaban.

Keberhasilan perjuangan Muhammadiyah dalam meluruskan arah dan perjalanan bangsa melalui perjuangan konstitusional yang diprakarsai Prof Dr Din Syamsudin sebagai Ketua Umum merupakan *ijtihad* politik nyata yang berada dalam ranah *soft politics*.

“Perjuangan seperti ini, kiranya perlu diperluas, tidak hanya dalam *scope* nasional, akan tetapi kalau memungkinkan berskala internasional. Muhammadiyah sudah banyak melakukan perjuangan dalam lingkup internasional, namun masih lebih banyak pada ranah agama, khususnya dunia Islam, namun belum banyak menyentuh ranah kemanusiaan, keadilan internasional, maupun peradaban umat manusia secara umum,” kata Muhadjir memaparkan.

Guna meningkatkan peran internasional, Muhammadiyah perlu mengembangkan *networking*, merintis dan mempererat jalinan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan, dan lain-lain.

Hal ini penting tidak hanya karena usia Muhammadiyah yang matang setelah memasuki abad kedua, namun karena kultur dunia yang kian berubah menuntut perubahan strategi perjuangan Muhammadiyah.

■ ed: m akbar wijaya